

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemilikan perusahaan dapat menyebabkan konflik keagenan yaitu konflik antara kepentingan manajer (agen) dengan kepentingan pemegang saham. Konflik keagenan ini terdapat 2 jenis, jenis yang pertama yaitu manajer akan melakukan tindakan yang hanya menguntungkan pihaknya saja tetapi merugikan pihak pemegang saham.

Konflik keagenan jenis yang kedua yaitu konflik yang terjadi antara pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan pemegang saham minoritas (pemegang saham non pengendali), konflik keagenan jenis kedua ini dapat terjadi apabila pemegang saham pengendali berusaha mendapatkan manfaat pribadi tetapi tidak menguntungkan pihak pemegang saham non pengendali. Untuk jenis konflik keagenan yang kedua ini biasanya terjadi di perusahaan yang kepemilikannya keluarga yaitu konflik antara pemegang saham pengendali (keluarga) dan pemegang saham non pengendali (non keluarga) mengenai pembagian dividen perusahaan.

Berdasarkan penelitian Mahadwartha dalam Cahyani dan Sanjaya (2014) struktur kepemilikan saham mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan. Kebijakan dividen adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen atas laba yang dihasilkan perusahaan akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen atau ditahan guna pembiayaan investasi. Jika pihak manajemen memilih untuk membayar dividen maka sumber pendanaan internal akan berkurang, sebaliknya jika manajemen memilih untuk tidak membayar atau membayar dividennya kecil maka peluang perusahaan untuk investasi akan meningkat karena laba yang dihasilkan

sepenuhnya digunakan untuk investasi sehingga pendanaan internal meningkat. Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 71 mengungkapkan bahwa dividen hanya bisa dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif (jurnal Cahyani dan Sanjaya, 2014).

Keluarga memiliki suara yang cukup kuat dalam menentukan kebijakan dividen saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga konflik keagenan di perusahaan keluarga bukan lagi antara manajer dan pemegang saham tetapi sudah bergeser antara pemegang saham pengendali (keluarga) dan pemegang saham non pengendali (non keluarga). Keluarga sebagai pemegang saham pengendali akan mengambil keputusan sesuai keinginan keluarga sehingga rentan dengan konflik kepentingan. Apalagi jika keluarga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan, situasi ini semakin mendukung pihak keluarga untuk membuat keputusan sesuai dengan kepentingannya sehingga hanya menguntungkan pihaknya sendiri dengan melakukan ekspropriasi. Ekspropriasi merupakan tindakan yang dilakukan pemegang saham pengendali (keluarga) untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan menggunakan hak kontrol yang dimiliki (Claessens *et al*, 2000).

Berdasarkan penelitian mengenai kebijakan dividen pada perusahaan keluarga pernah dilakukan oleh Pindado *et al*. (2012) dengan sampel 645 perusahaan di zona Euro dimana 482 perusahaan merupakan perusahaan keluarga dan 163 perusahaan non keluarga. Hasilnya membuktikan bahwa perusahaan keluarga membagikan dividen yang lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan perusahaan non keluarga. Perusahaan

menjadikan dividen sebagai alat untuk mengatasi konflik keagenan yang terjadi dalam struktur kepemilikan keluarga yaitu antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Pembayaran dividen melindungi pemegang saham non pengendali dari tindakan ekspropriasi yang mungkin saja dilakukan oleh pemegang saham pengendali.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Atmaja *et al.* (2009) yaitu perusahaan keluarga membagikan dividen lebih tinggi dibanding non keluarga pada perusahaan publik di Australia. Dengan membagikan dividen yang tinggi berarti perusahaan keluarga tidak melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Tetapi hasil yang berbeda diperoleh dalam penelitian Wei *et al.* (2011) yaitu perusahaan keluarga memiliki *dividend payout ratio* yang lebih rendah sehingga membayar dividen yang cukup kecil dibandingkan perusahaan non keluarga.

Untuk kebijakan *leverage*, kebijakan *leverage* adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajer guna untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka semakin besar pula *agency cost* dikarenakan resiko nya juga tinggi.

Berdasarkan penelitian Mulyani, E., *et al* (2016) menyatakan bahwa perusahaan keluarga lebih besar menggunakan sumber daya internal untuk membiayai proyek mereka dengan mengurangi dividen dan mengandalkan *leverage* untuk mendapatkan sumber tambahan, Sehingga perusahaan keluarga cenderung memiliki *leverage* yang lebih tinggi daripada perusahaan non keluarga.

Tetapi berdasarkan teori Facio *et al* (2001) perusahaan keluarga cenderung memiliki *leverage* yang lebih rendah untuk menghindari atau mengurangi *agency cost* pada *cash flows* atau arus kas perusahaan.

Oleh karena berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang tidak pasti mengenai dividen dan *leverage* pada perusahaan keluarga dan non keluarga, menyebabkan keinginan saya untuk meneliti perbedaan dividen dan *leverage* pada perusahaan keluarga dan non keluarga yang ada di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pembayaran dividen perusahaan keluarga di Indonesia lebih besar daripada perusahaan non keluarga di Indonesia?
2. Apakah kebijakan *leverage* perusahaan keluarga di Indonesia lebih besar daripada perusahaan non keluarga di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perbandingan pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan keluarga dengan perusahaan non keluarga di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan kebijakan *leverage* yang dilakukan oleh perusahaan keluarga dengan perusahaan non keluarga di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun teoritis, yaitu :

1. Bagi penulis sendiri. Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan khususnya mengenai kepemilikan perusahaan, dividen, *leverage*, dan konflik keagenan.

2. Bagi Peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian- penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.
3. Bagi akademisi. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta memberi kontribusi dalam pengembangan teori mengenai kepemilikan perusahaan, *dividen*, *leverage*, dan konflik keagenan.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori yang mendukung pembuatan skripsi, hubungan antar variabel, model penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang berisi : desain penelitian, identifikasi variable, definisi operasional, populasi dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang proses pemilihan sampel penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian guna penarikan simpulan dan penyajian saran dalam penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi uraian tentang simpulan dari hasil analisis serta saran bagi penelitian berikutnya yang sejenis.